



PT. BPR MULYO RAHARJO

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2021

🏠 Ds. Blaran, Kec. Barat, Magetan
☎ 0351-869375
📠 0351-8630335

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Struktur Tata Kelola PT. BPR Mulyo Raharjo telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Mulyo Raharjo mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.



- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Mulyo Raharjo beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Kinerja dan efisiensi PT. BPR MULYO RAHARJO

Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan PT. BPR MULYO RAHARJO

Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR MULYO RAHARJO

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Mulyo Raharjo berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Mulyo Raharjo dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Rachmad Riyantara S.I
	NIK	: 3577031812690002
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Bertanggungjawab mengurus semua harta kekayaan BPR. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja BPR. Mengangkat dan memberhentikan karyawan termasuk dalam penggajian karyawan. Bertanggungjawab atas pencapaian rencana kerja dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh komisaris. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaanAPU PPT.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Sumarto
	NIK	: 3577033005700001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhiseluruh peraturan OJK dan peraturan perundang - undangan lainnya, Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang - undangan. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait. Melaporkan kepada direksi lainnya dan Dewan komisaris terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR dan Direksi BPR. Mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah kecuali persetujuan penyaluran dana. Memeriksa kebenaran dan mengawasi semua penerimaan dan pengeluaran biaya operasional. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan terhadap transaksi harian. Bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional perusahaan. mewakili direktur utama dalam hal berhalangan hadir. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaanAPU PPT.



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya meningkatkan penagihan kredit hapus buku.
Direksi telah memberikan uang pesangon kepada karyawan pensiun sesuai peraturan perusahaan baru.
Direksi telah melakukan pengangkatan karyawan tetap sesuai temuan OJK mulai bulan november 2021.
Direksi telah berupaya melakukan penanganan lebih intensif terhadap kredit bermasalah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : Siti Budi Harti NIK : 352006460760004 Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap unit kerja. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Menyetujui rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan prosedur perkreditan. Melakukan pengawasan aktif pelaksanaan program APU PPT

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama : Amir Rudin NIK : 3520121502710001 Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap unit kerja. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Menyetujui rencana bisnis BPR yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan serta melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan prosedur perkreditan. Melakukan pengawasan aktif pelaksanaan program APU PPT

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi meningkatkan penagihan kredit hapus buku dengan membentuk tim khusus penagihan hapus buku.
Agar Direksi memberikan uang pesangon bagi karyawan/ti yang sudah purna tugas sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang baru.
Agar Direksi direksi menindaklanjuti pemeriksaan OJK terkait pengangkatan karyawan tetap.
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi mengantisipasi masuknya kredit dalam perhatian khusus ke kredit non lancar sehingga NPL tidak meningkat.
Agar Direksi meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dalam penanganan kredit bermasalah sehingga dapat segera terselesaikan.



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rachmad Riyantara S.I	3577031812690002	399.000.000	7,98%
2	Sumarto	3577033005700001	221.000.000	4,42%



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rachmad Riyantara S.I	3577031812690002	601738	PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	-
2	Sumarto	3577033005700001	601738	PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rachmad Riyantara S.I	3577031812690002	0	0	RACHMAD RIYANTARA SI-Ada hubungan
2	Sumarto	3577033005700001	0	0	SUMARTO-Ada hubungan

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rachmad Riyantara S.I	3577031812690002	0	0	RACHMAD RIYANTARA SI-Sebagai pemegang saham
2	Sumarto	3577033005700001	0	0	SUMARTO-Sebagai pemegang saham

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siti Budi Harti	352006460760004	440.000.000	8,80%
2	Amir Rudin	3520121502710001	327.000.000	6,54%



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Siti Budi Harti	352006460760004	601738	PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	97,73%
2	Amir Rudin	3520121502710001	601738	PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Siti Budi Harti	352006460760004	0	0	SITI BUDI HARTI-Ada hubungan
2	Amir Rudin	3520121502710001	0	0	AMIR RUDIN-Ada hubungan

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Siti Budi Harti	352006460760004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Amir Rudin	3520121502710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	153.360.000	2	47.520.000
2	Tunjangan	2	660.275.464	2	90.333.616
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			813.635.464		137.853.616



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada (0)	tidak ada (0)
2	Transportasi	Kendaraan roda 4 yaitu Kijang Inova dan Toyota Avansa(2)	tidak ada (0)
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan(2)	tidak ada (0)
4	Fasilitas lainnya	tidak ada (0)	tidak ada (0)

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,88	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,30	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,81	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,76	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-3-24	3	Pemberlakuan Peraturan Perusahaan baru, Pengawasan terhadap laporan APU PPT terkait pemantauan risiko nasabah, Peningkatan penagihan kredit hapus buku.
2	2021-4-15	4	Evaluasi kinerja bulan maret 2021, Pelaksanaan hasil RUPS tentang deviden.
3	2021-7-2	4	Evaluasi kinerja bulan juni 2021, Persetujuan terkait surat keputusan direksi perihal pemberian kredit bagi karyawan/ti.
4	2021-8-26	4	Pemenuhan PPAP
5	2021-9-4	4	Evaluasi keuangan bulan agustus 2021, tindak lanjut hasil exit meeting OJK, penyelesaian kredit bermasalah, penutupan sementara kantor kas ngariboyo, jungke dan maospati
6	2021-11-10	6	Evaluasi laporan keuangan bulan oktober 2021, pembentukan tim kredit bermasalah, pengangkatan karyawan kontrak menjadi tetap.
7	2021-12-15	4	Evaluasi laporan keuangan bulan november 2021, pembahasan RBB tahun 2022.



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Siti Budi Harti	352006460760004	7	0	100,00%
2	Amir Rudin	3520121502710001	7	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	2	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	SUMARTO	Direktur	3577033005700001	SITI BUDI HARTI	Komisaris Utama	3520064607640004	Kredit	350	Sesuai ketentuan internal
2	AGUS MINANTO	PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL	3520150309680001	RACHMAD RIYANTARA SUNU INDRA	DIREKTUR UTAMA	3577031812690002	KREDIT	140	Sesuai ketentuan internal
3	ANDI KUNCAHYONO	KABAG PEMASARAN	3520122812720001	RACHMAD RIYANTARA SUNU INDRA	DIREKTUR UTAMA	3577031812690002	KREDIT	200	Sesuai ketentuan internal
4	NATALIA PURWANTI	PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN /MANRISK /APU PPT	3310186212850001	RACHMAD RIYANTARA SUNU INDRA	DIREKTUR UTAMA	3577031812690002	KREDIT	85	Sesuai ketentuan internal
5	AGUNG ARI KUSUMO	KEPALA CABANG	3519082502850002	RACHMAD RIYANTARA SUNU INDRA	DIREKTUR UTAMA	3577031812690002	KREDIT	175	Sesuai ketentuan internal



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-05-03	Sosial	Pembagian takjil gratis bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar kantor PT. BPR Mulyo Raharjo	Masyarakat	2.400.000
2	2021-05-04	Sosial	Bakti Sosial panti asuhan	Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan, Panti Asuhan Al Hayat	2.000.000
3	2021-05-07	Sosial	bakti sosial panti asuhan yatim piatu	Yayasan sosial islam siti rohmah, panti asuhan riyadhul jannah	4.400.000
4	2021-12-22	Sosial	bakti sosial yatim piatu	Panti asuhan al munawwarah, panti asuhan muhammadiyah ngawi, Yayasan bina insani ngawi	7.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mulyo Raharjo ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mulyo Raharjo. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mulyo Raharjo ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mulyo Raharjo, Terima Kasih.

Magetan, 28 April 2022
Persetujuan Pengurus PT. BPR Mulyo Raharjo

Siti Budi Harti
Komisaris Utama

Rachmad Riyantara S.I
Direktur Utama



PT. BPR MULYO RAHARJO

Ds. Blaran, Kec. Barat

Magetan

Telp. 0351-869375, Fax. 0351-8630335

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR MULYO RAHARJO
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,92	1,20	0,28	2,40	0,480
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	1,05	0,30	2,24	0,336
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,40	1,20	0,33	2,93	0,293
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	1,00	0,23	2,33	0,233
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,34	1,14	0,30	2,78	0,278
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,50	1,40	0,35	3,25	0,244
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,50	0,80	0,20	2,50	0,188
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,50	0,80	0,20	2,50	0,188
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,6

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Cukup Baik

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mulyo Raharjo ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mulyo Raharjo. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

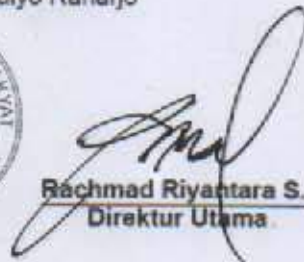
Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mulyo Raharjo ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mulyo Raharjo, Terima Kasih.

Magetan, 28 April 2022

Persetujuan Pengurus PT. BPR Mulyo Raharjo



Siti Budi Harti
Komisaris Utama



Rachmad Riyantara S.I
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Mulyo Raharjo

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495751-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601096-
29042022110602

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr_mulyo_raharjo@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-29 11:06:02

 Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.